



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS
Jl. Ir. Sutami, No 36 A, Jebres, Surakarta
website: <https://jab.fe.uns.ac.id/> email: jabfebuns@gmail.com

No : 006/JAB/2026
Lampiran : -
Perihal : Informasi penerimaan artikel

Kepada Yth.
Wakhid Ansori, Vidiyanna Rizal Putri, dan Sumarno Manrejo
di-Tempat

Bersama ini kami beritahukan bahwa setelah melalui proses *review*, Dewan Editor Jurnal Akuntansi dan Bisnis memutuskan menerima artikel:

Judul : Menakar Efektivitas Dana Bantuan Sosial dan Dana Desa
Nama Penulis : Wakhid Ansori, Vidiyanna Rizal Putri, dan Sumarno Manrejo
Instansi : Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Artikel tersebut akan dipublikasikan pada Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB) Volume 2026 No. 1. Biaya publikasi artikel sebesar Rp. 2.000.000 dapat ditransfer ke No. Rek. BNI: 9880539919000001 atas nama UNSVA-Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Setelah melakukan pembayaran, mohon melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer ke email: jabfebuns@gmail.com.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 19 Juni 2026
Chief Editor JAB



Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.
NIP.196411201991031002

MENAKAR EFEKTIVITAS DANA BANTUAN SOSIAL DAN DANA DESA

Wakhid Ansori (wakhid.ansori@gmail.com)

Vidiyanna Rizal Putri

Sumarno Manrejo

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

ABSTRACT

This study investigates the effectiveness of social assistance funds and village funds in reducing poverty, increasing Gross Regional Domestic Product (GRDP), and improving the Human Development Index (HDI) across local governments on Java Island. It also examines whether transparency and accountability in budget management moderate the relationships between these fiscal instruments and development outcomes. Using secondary data from 119 local governments with 315 observations. Data and hypothesis testing were conducted using multiple linear regression and moderation analysis with IBM Statistics software SPSS. The results show that social assistance funds significantly reduce poverty and positively contribute to GRDP and HDI. In contrast, village funds show mixed results: while they significantly increase GRDP, they are associated with higher poverty levels and lower HDI. Furthermore, transparency and accountability in budget management do not moderate the effects of social assistance funds or village funds on poverty, GRDP, or HDI.

Keywords: Social Assistance Funds, Village Funds, Poverty, GRDP, Human Development Index

Studi ini bermaksud memberikan bukti empiris efektivitas dana bantuan sosial dan dana desa dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan aktivitas ekonomi (PDRB) dan peningkatan IPM di Pulau Jawa. Selain itu, studi ini menguji apakah transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memperkuat efektivitas dana bantuan sosial dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, aktivitas ekonomi, dan IPM. Populasi dalam studi ini adalah 119 pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 315 pengamatan. Pengujian data dan hipotesis menggunakan regresi linier berganda serta analisis moderasi dengan menggunakan *tools* IBM SPSS Statistics SPSS. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dana bantuan sosial terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan IPM di wilayah tersebut. Sementara itu, dana desa belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan. Meskipun mampu meningkatkan ekonomi, dana desa justru belum efektif dalam penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak terbukti memoderasi dampak dana bantuan sosial atau dana desa terhadap tingkat kemiskinan, aktivitas ekonomi, dan IPM.

Kata kunci: Dana Bantuan Sosial, Dana Desa, Tingkat Kemiskinan, PDRB, IPM

Tanggal Masuk:

9 Februari 2026

Tanggal Revisi:

3 Maret 2026

6 Juni 2026

14 Juni 2026

Tanggal Diterima:19 Juni 2026

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan daerah pada dasarnya tercermin dari kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas aktivitas ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup. Ketiga aspek tersebut umumnya diatribusikan melalui tingkat kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang

relatif stabil, pencapaian pada ketiga indikator tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk. Sebagian besar penduduk miskin masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan, dengan proporsi terbesar di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya

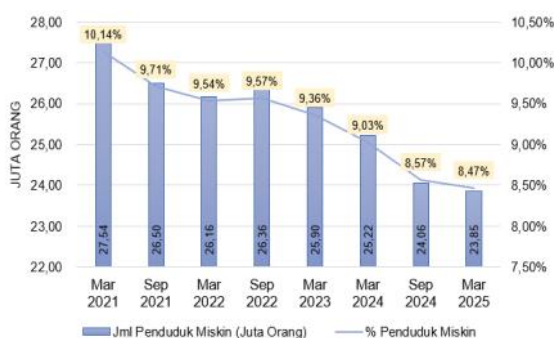
menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Literatur pembangunan mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi pendapatan yang merata cenderung menghasilkan “*growth without equity*” (Bourguignon, 2003).

Di sisi lain, aktivitas ekonomi nasional yang nampak dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh mencapai 5,03 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,05 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), Indonesia menduduki peringkat negara ke-8 dengan PDB tertinggi di dunia pada tahun 2024. Hal ini sepintas menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia tergolong baik. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tidak diimbangi dengan penurunan kemiskinan, terutama di negara berkembang dengan ketimpangan struktural yang masih kuat (Dollar & Kraay, 2002). Buktinya, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun kinerja PDB-nya cukup baik.

Selain kemiskinan dan aktivitas ekonomi, kualitas pembangunan manusia juga menjadi proksi penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan IPM melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–

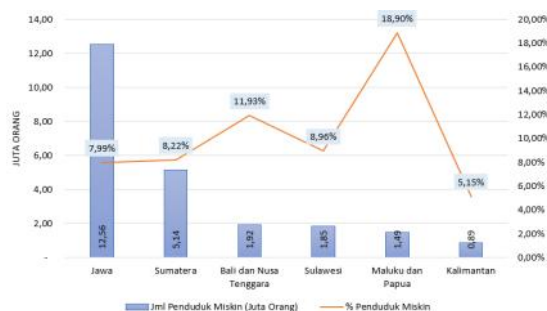
2029, pemerintah menetapkan Asta Cita (8 Prioritas Nasional). Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan menjadi tujuan dari salah satu prioritas nasional dalam Asta Cita, diantaranya berupa pembangunan dari desa. Upaya pemerintah dalam program prioritas nasional tersebut antara lain pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa melalui dana desa, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, dan transformasi pembangunan manusia guna memacu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai upaya mencapai sasaran tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai instrumen fiskal, diantaranya melalui dana bantuan sosial dan dana desa yang langsung menyasar pada rakyat miskin. Bantuan sosial diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sekaligus menjaga daya beli kelompok rentan. Sementara itu, dana desa difokuskan untuk memperkuat pembangunan desa melalui penyediaan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Secara teoritis, kedua instrumen fiskal tersebut diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB, serta memperbaiki kualitas pembangunan manusia yang diproksikan dalam IPM. Anisa *et al.* (2025) menemukan bahwa pengeluaran untuk bantuan sosial secara signifikan mempengaruhi pengurangan kemiskinan. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya bantuan sosial berperan secara signifikan dalam pemenuhan



Gambar 1.

Tren Rasio Penduduk Miskin di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)



Gambar 2.

Rasio dan Jumlah Penduduk Miskin Per Regional.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

kebutuhan dasar, menekan beban ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Salah satu cara mendorong kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, Rizki *et al.* (2023) mendapati bahwa pemerintah seharusnya dapat membiayai pengeluaran bantuan sosial secara langsung, tanpa bergantung pada sektor swasta. Hal ini diharapkan dapat menyokong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Lebih lanjut, Sumiyarti (2022) dan Rizki *et al.* (2023) menemukan bahwa pengeluaran untuk bantuan sosial secara positif berdampak terhadap PDRB. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa ekonomi berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan keterlibatan pemerintah melalui pendanaan publik (Sumiyarti, 2022).

Dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia diperlukan intervensi bantuan dari pemerintah yang diwujudkan dalam pagu anggaran sektor penunjang pembangunan manusia, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi (Septiani, 2022). Namun demikian, kesimpulan studi Akbar (2016) menemukan tidak adanya hubungan antara pengeluaran bantuan sosial dengan IPM, bertentangan dengan kondisi ini.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui berbagai skema kebijakan, diantaranya distribusi dana desa, dana bantuan sosial, dan pengalokasian dana pembangunan daerah yang ditopang oleh desentralisasi fiskal. Meskipun demikian, beberapa penelitian dan tinjauan kebijakan terus berfokus pada efektivitas anggaran ini. Karena pengurangan kemiskinan merupakan prioritas utama bagi dana desa, sangat penting agar semua skema alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan desa-desa diintegrasikan dan dioptimalkan (Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019).

Beberapa studi menemukan bahwa dana desa berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan

pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi desa (Suherman *et al.*, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan Dollar dan Kraay (2002) serta Bourguignon (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan apabila manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Muliza (2022), Rahim (2022), Wasudewa dan Iskandar (2023), serta Prasetyo dan Dinarjito (2021) menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap PDRB melalui peningkatan infrastruktur dan produktivitas ekonomi masyarakat. Temuan ini senada dengan Fazri *et al.* (2022) yang memotret bahwa dana desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, Harianja (2023) mendapati pengaruh dana desa terhadap PDRB belum signifikan, artinya efektivitas dana desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan dan karakteristik daerah.

Sementara itu, korelasi dana desa dan pembangunan manusia menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pandiangan *et al.* (2021), Hardianto *et al.* (2024), serta Manggala dan Yulianty (2024) menemukan bahwa dana desa berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM melalui perbaikan akses layanan dasar dan infrastruktur pendukung pembangunan manusia. Namun, Kafabih dan Utami (2024) mengungkapkan peningkatan dana desa belum tentu diikuti peningkatan kualitas pembangunan manusia karena sebagian besar alokasi masih difokuskan pada pembangunan fisik. Temuan tersebut menjadi sinyal bahwa dampak dana desa terhadap IPM tidak hanya ditentukan oleh besarnya pagu, tetapi juga oleh prioritas penggunaan dana dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Meskipun hubungan bantuan sosial dan dana desa dengan kemiskinan, PDRB, maupun IPM telah diteliti, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu indikator pembangunan secara terpisah sehingga menghasilkan pemahaman yang cenderung parsial mengenai efektivitas

kedua instrumen fiskal (dana bantuan sosial dan dana desa). Padahal, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia merupakan dimensi pembangunan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Keterbatasan kajian yang menganalisis ketiga indikator tersebut secara simultan menyebabkan belum tersedianya bukti empiris yang komprehensif mengenai sejauh mana dana bantuan sosial dan dana desa mampu menghasilkan dampak multidimensi bagi pembangunan daerah. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya informasi yang digunakan pemerintah untuk menilai apakah intervensi fiskal tersebut tidak hanya efektif dalam menurunkan kemiskinan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur (*research gap*) sekaligus menyediakan *evidence-based policy* yang dapat mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan alokasi bantuan sosial dan dana desa guna mencapai pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan terintegrasi. Selain itu, peran transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah sebagai faktor yang memoderasi efektivitas instrumen fiskal belum banyak dieksplorasi, terutama dalam studi berbasis data panel pemerintah daerah. Padahal, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik benar-benar menghasilkan *output* pembangunan yang optimal.

Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program bantuan sosial dan dana desa sebagai instrumen utama pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan meningkatnya tuntutan efektivitas belanja publik, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan bahwa setiap

rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, keberhasilan program bantuan sosial dan dana desa masih menunjukkan hasil yang beragam antar daerah, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai dampaknya terhadap berbagai dimensi pembangunan.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara instrumen fiskal, tata kelola pemerintahan, dan berbagai indikator pembangunan, pemerintah berisiko menghadapi inefisiensi alokasi sumber daya dan kurang optimalnya hasil pembangunan. Dengan menggunakan data kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2020-2024 serta memadukan perspektif teori keagenan, teori legitimasi, dan *theory of planned behaviour*, penelitian ini diperlukan untuk menghasilkan bukti empiris yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas belanja publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah guna mencapai pembangunan yang lebih berkualitas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Pola interaksi antara prinsipal dan agen dikenal sebagai teori agen, dan hal ini menjadi dasar penelitian ini. Jensen dan Meckling (1976) sebagai pencetus teori ini, menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu pihak (prinsipal) dan pihak lain (agen) sepakat bahwa agen akan mewakili kepentingan prinsipal dalam pengambilan kebijakan sebaik mungkin. Kondisi ini dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*) yang dapat menimbulkan asimetri informasi dan perilaku

oportunistik. Dalam sektor publik, teori agensi masih menjadi kerangka dominan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik (Schillemans & Bjurstrom, 2020). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa kebijakan serta penggunaan anggaran daerah selaras dengan kepentingan masyarakat (Tavares & Cruz, 2020 serta Widiastuti *et al.*, 2026)

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Pada tahun 1975, Dowling dan Pfeffer menjadi yang pertama kali memperkenalkan *Legitimacy Theory*. Menurut pandangan ini, suatu organisasi harus selalu memastikan bahwa tindakan mereka tidak bertentangan dengan standar sosial dan hukum. Dalam sudut pandang teori legitimasi, organisasi cenderung melakukan pengungkapan informasi secara sukarela apabila manajemen meyakini bahwa tindakan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Teori legitimasi menitikberatkan hubungan antara organisasi dan lingkungan sosialnya. Legitimasi pemda sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memandang dan menerima pemerintahan tersebut. Pemda termotivasi untuk menunjukkan tanggung jawab melalui laporan keuangan karena apresiasi masyarakat terhadap upaya mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, salah satunya melalui penerapan transparansi dalam pengelolaan dan penyajian informasi keuangan.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Setelah melakukan penelitian yang mendalam, Ajzen mengembangkan TPB pada tahun 1991. Teori ini memperluas *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Asumsi pertama dalam TPB adalah bahwa orang akan mengikuti keputusan yang rasional dan masuk akal.

Dengan menganalisa hasil dari perilaku yang dimaksud, data yang dikumpulkan memperhitungkan perilaku yang tersedia, baik yang tersurat maupun tersirat. TPB sangat relevan menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan keuangannya. Kerangka teori ini berfokus pada niat individu dalam bertindak, yang kemudian diyakini menjadi prediktor utama dari perilaku aktual. Dalam konteks ini, perilaku yang dimaksud adalah tindakan pemerintah daerah mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, serta selaras dengan aturan. TPB membantu mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang membentuk niat pemerintah daerah untuk bertindak jujur. Kerangka pikir dalam studi ini diilustrasikan pada Gambar 3.

Pengaruh Dana Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Dalam konteks teori keagenan, salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah adalah melalui distribusi dana bantuan sosial yang tepat sasaran dan berbasis data. Simangunsong dan Sihotang (2023) menyatakan bahwa bantuan sosial menurunkan kemiskinan dengan cepat melalui peningkatan konsumsi dasar dan daya beli rumah tangga miskin. Hal ini selaras dengan temuan Anisa *et al.* (2025) di Desa Pendem, Kabupaten Karanganyar yang mendapati dana bantuan sosial berimplikasi terhadap penurunan kemiskinan. Temuan ini mengungkap dana bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan beban ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat miskin yang meningkat. Temuan ini senada dengan Lindiasari dan Ramadhani (2019) yang melakukan penelitian atas pengaruh bantuan sosial (Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dan Beras Sejahtera (Rastra), dan PKH terhadap jumlah penduduk miskin. Simpulan studinya adalah pemberian dana bansos secara tunai mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin yang digunakan untuk kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan anak, dan

kesehatan.

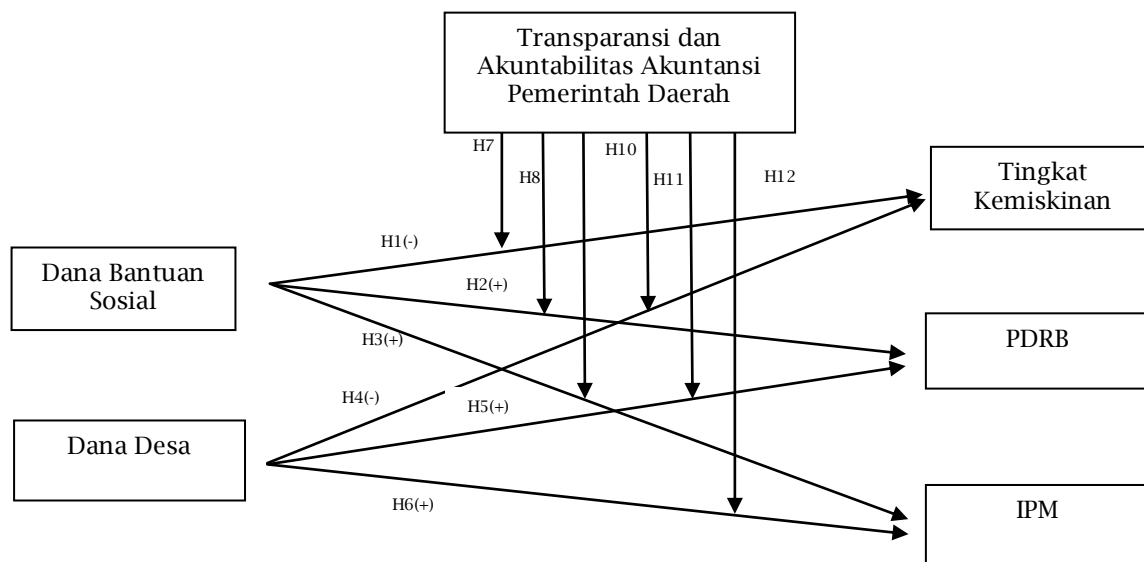
Di sisi lain, berbagai studi mendapati bahwa tingkat kemiskinan tidak sekedar dipicu oleh program bantuan sosial, melainkan juga oleh faktor struktural seperti karakteristik ekonomi wilayah, akses pasar, dan kualitas infrastruktur. Penelitian lain menemukan bahwa kepadatan infrastruktur jalan berasosiasi dengan penurunan tingkat kemiskinan melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan konektivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, pada wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju seperti Pulau Jawa, kualitas dan kepadatan infrastruktur terbukti menjadi instrumen penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan (Krugman, 1991, dan Frick & Rodríguez-Pose, 2023). Temuan ini menyoroti efektivitas bantuan sosial dalam menekan kemiskinan dapat menjadi lebih optimal apabila didukung oleh infrastruktur dan akses ekonomi yang memadai. Di sisi lain, penelitian Alfath *et al.* (2025) di Sumatera Utara mengungkap bahwa program bansos tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Penyebabnya adalah ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, atau nilai bantuan yang tidak memadai secara ekonomi. Atas dasar berbagai literatur dan studi tersebut, hipotesis penelitian ini:

H1: Dana bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Pengaruh Dana Bantuan Sosial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja pemerintah berimbas pada permintaan agregat, mendorong *output* dan kesempatan kerja, terutama saat ekonomi lesu (Ugochukwu & Oruta, 2021). Lebih lanjut, dalam teori pengeluaran pemerintah, alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Dengan demikian, belanja pemerintah berperan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong dinamika kegiatan ekonomi secara nasional (Simanjuntak *et al.*, 2025).

Studi yang dilakukan oleh Sumiyarti (2022) terhadap 33 Provinsi di Indonesia menemukan aktivitas ekonomi yang diatribusikan dalam PDRB dipengaruhi oleh instrumen belanja tidak langsung, seperti dana bantuan sosial. Peningkatan aktivitas ekonomi menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan. Lebih lanjut, Setiawan *et al.* (2026) mendapati pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan wilayah dalam mengoptimalkan sumber daya pembangunan dan modal manusia. Temuan ini menyoroti peningkatan aktivitas ekonomi tidak sekedar bergantung pada investasi, tetapi juga terhadap faktor-faktor yang memperkuat daya beli dan kapasitas produktif



Gambar 3.
Kerangka Pemikiran

masyarakat. Dalam konteks tersebut, bantuan sosial berpotensi meningkatkan permintaan agregat dan aktivitas ekonomi lokal sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PDRB.

Namun demikian, penelitian Thantawi *et al.* (2023) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak mendukung simpulan tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa dana bantuan sosial berdampak negatif terhadap PDRB. Kombinasi antara dana bantuan sosial langsung dan program pemberdayaan ekonomi memberikan *output* yang lebih optimal dibandingkan pendekatan yang hanya terfokus pada transfer tunai. Kondisi ini disinyalir mampu menciptakan *multiplier effect* pada PDRB melalui investasi dalam keterampilan dan usaha kecil. Untuk itu, peneliti menyusun hipotesisnya:

H2: dana bantuan sosial berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto

Pengaruh Dana Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah mengucurkan dana bantuan sosial sebagai instrumen fiskal dalam menyokong kesejahteraan masyarakat, utamanya kelompok rentan dan miskin (Purba *et al.*, 2025). Bantuan sosial adalah instrumen fiskal strategis untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan manusia, terutama bila tepat sasaran dan terintegrasi dengan layanan dasar. Hal ini diharapkan mendorong peningkatan IPM. Dengan kata lain, dana bantuan sosial memiliki peran strategis sebagai faktor pendorong pembangunan manusia, baik langsung dan tidak langsung.

Studi empiris Septiani (2022) pada 23 provinsi di Indonesia tahun 2010-2020 menghasilkan simpulan bahwa dana bantuan sosial tidak berdampak terhadap IPM. Hal ini tidak selaras dengan kebijakan yang mengatur tujuan dana bantuan sosial dalam memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Hal senada juga terbukti dengan penelitian di NTB tahun 2013-2022 oleh Harsono *et al.* (2024), temuannya adalah dana bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap IPM.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sekedar bergantung pada bantuan finansial, tetapi juga memerlukan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, modal ekonomi, dan pemberdayaan sosial yang terintegrasi. Harianto dan Listyani (2025) menemukan terbatasnya daya ekonomi, pelatihan vokasional, dan norma sosial yang restriktif merupakan faktor yang memperkuat kerentanan masyarakat pedesaan, sehingga program pembangunan perlu dirancang secara lebih inklusif dan multidimensional. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori bahwa bantuan sosial diharapkan mampu menekan disparitas sosial, meningkatkan akses layanan dasar, dan meningkatkan IPM. Dengan demikian, secara teoritis dan empiris terdapat dasar yang kuat untuk menguji pengaruh dana bantuan sosial terhadap IPM dengan mempertimbangkan konteks regional serta transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah. Berdasarkan deskripsi ini, peneliti merancang hipotesis:

H3: dana bantuan sosial berperan positif terhadap indeks pembangunan manusia

Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Secara hukum, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, guna penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Marekan & Ansori, 2019). Tujuan utamanya menurut Bahri (2023) adalah mengurangi ketimpangan desa/kota, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong kemandirian desa.

Penelitian Yacoub (2022) di Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa pengalokasian dana desa secara produktif mampu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, yang pada gilirannya menekan angka kemiskinan desa secara signifikan. Selain itu, kombinasi antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat

berkontribusi lebih optimal dibandingkan pendekatan yang hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, Muliza (2022) di Aceh menyoroti bahwa pemanfaatan dana desa di beberapa wilayah masih dominan untuk proyek infrastruktur tanpa didukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil studi ini tidak sejalan dengan tujuan dana desa yang diarahkan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan mendukung ketahanan sosial masyarakat desa.

Temuan Shalahuddin *et al.* (2026) mendapati suatu wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi bernilai tinggi berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi apabila manfaat ekonomi tidak menyebar secara inklusif kepada masyarakat sekitar. Studi tersebut juga mengungkap infrastruktur berperan penting sebagai faktor pendukung yang memperkuat konektivitas pasar dan mengurangi kemiskinan, sehingga efektivitas program pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas aksesibilitas dan keterhubungan ekonomi antarwilayah.

Sementara itu, Temuan Harianto dan Listyani (2025) memotret keterbatasan akses terhadap modal ekonomi, pelatihan vokasional, dan kesempatan berusaha merupakan faktor utama yang mempertahankan kerentanan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keterampilan, dan penguatan kapasitas lokal berpotensi mengurangi kemiskinan secara lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Untuk itu, pengembangan hipotesis penelitian ini:

H4: dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Pengaruh Dana Desa terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Dana desa diarahkan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi,

serta mendukung pertumbuhan produktivitas masyarakat desa. Wasudewa dan Iskandar (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan dana desa diposisikan sebagai instrumen fiskal strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) bila dikelola produktif, partisipatif, dan efisien.

Penelitian Rahim (2022) di wilayah Papua Barat mendapati bahwa dana desa terbukti berkontribusi positif terhadap kenaikan PDRB. Manggala dan Yulianty (2024) mempertegas bahwa upaya peningkatan PDRB perlu diiringi dengan kebijakan yang menjamin bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya penduduk di wilayah terpencil. Namun, studi di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Harianja (2023) menyoroti bahwa dana desa ternyata tidak berdampak terhadap pertumbuhan PDRB. Rendahnya kapasitas manajerial pemerintah desa dan kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor penghambat efektivitas dana desa dalam mendorong pertumbuhan PDRB.

Menurut Warokka *et al.* (2025), pengelolaan dana desa yang efektif dapat menyokong aktivitas ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur produktif, penguatan usaha masyarakat, dan peningkatan konektivitas ekonomi desa. Kondisi tersebut berpotensi mendorong produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak meningkatkan PDRB. Sedangkan Setiawan *et al.* (2026) mengungkap pertumbuhan ekonomi daerah dipicu oleh kemampuan daerah memanfaatkan sumber daya pembangunan secara produktif menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks pembangunan desa, dana desa yang diarahkan pada penguatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan infrastruktur ekonomi berpotensi mendorong aktivitas ekonomi yang tergambar dalam peningkatan PDRB. Sehingga hipotesis dalam studi ini:

H5: Dana desa berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto

Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kerangka pembangunan manusia, dana desa merupakan instrumen strategis peningkatan IPM bila diarahkan ke kesehatan, pendidikan, dan pendapatan berkelanjutan secara partisipatif dan akuntabel. (Pratama dan Mandai, 2023) menegaskan bahwa IPM dibentuk oleh kesehatan, pendidikan, dan standar hidup/pendapatan. Manggala dan Yulianty (2024) menyoroti dampak dana desa terhadap IPM di Jawa Tengah. Studinya menyimpulkan bahwa dana desa terbukti berperan dalam mendorong kenaikan IPM sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemanfaatan dana desa dalam program-program pembangunan, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat langsung memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas hidup penduduk desa.

Temuan ini selaras dengan Permatasari *et al.* (2024) dengan responden masyarakat desa di Kabupaten Pandeglang. Hasilnya adalah terdapat dampak positif antara pengelolaan dana desa dengan IPM. Di saat yang sama hasil temuan berbeda dikemukakan oleh Hardianto *et al.* (2024), yang mengungkapkan dana desa justru berdampak negatif terhadap IPM. Artinya, dana desa tidak berdampak dalam peningkatan IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rohim *et al.* (2026), pembangunan desa yang efektif memerlukan pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diyakini mampu mendorong kapasitas masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi meningkatkan kualitas hidup yang tergambar melalui capaian IPM.

Dengan demikian, analisis empiris terhadap hubungan antara dana desa dan IPM menunjukkan hasil yang beragam sehingga perlu dilakukan pengujian serupa atas efektivitas dana desa dalam

meningkatkan IPM. Nascimento *et al.* (2026) memotret bahwa organisasi berbasis masyarakat mampu menghasilkan nilai sosial melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta pemberdayaan perempuan. Temuan tersebut menyoroti peningkatan kualitas hidup masyarakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan lokal dalam mengonversi sumber daya tersebut menjadi manfaat sosial yang nyata. Dengan demikian, efektivitas program pembangunan yang didanai pemerintah berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Akhirnya, hipotesis dalam studi ini adalah:

H6: dana desa berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Dana Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Secara teoritis, dana bantuan sosial merupakan instrumen untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Namun, efektivitas bantuan sosial sangat ditentukan oleh desain, penargetan, dan tata kelola anggarannya (Purba *et al.*, 2025). Dalam kerangka teori keagenan, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah berfungsi sebagai variabel moderasi yang memastikan alokasi dana oleh pemerintah (agen) secara nyata sampai kepada masyarakat (prinsipal) yang berhak tanpa adanya kebocoran atau salah sasaran (*inclusion/exclusion error*).

Akuntabilitas yang tinggi, yang dicerminkan melalui transparansi penyaluran dan ketepatan data terpadu kesejahteraan sosial, akan memperkuat pengaruh positif bantuan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas seperti adanya praktik korupsi atau manipulasi data penerima akan mendistorsi manfaat ini, sehingga meskipun anggaran besar dialokasikan, dampak penurunan kemiskinannya menjadi tidak signifikan

(Purba *et al.*, 2025).

Lebih lanjut, perspektif *stewardship* yang digunakan oleh Girardi *et al.* (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program dalam menekan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasi. Studi tersebut menemukan bahwa keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan, rendahnya kapasitas manajerial, dan lemahnya keterlibatan anggota dapat mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan sosial. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah diperkirakan akan memperkuat pengaruh dana bantuan sosial maupun dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Untuk itu, hipotesis dalam studi ini:

H7: transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memoderasi hubungan antara dana bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Dana Bantuan Sosial terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Dalam kerangka teori pembangunan ekonomi regional dan kebijakan fiskal, dana bantuan sosial diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan PDRB melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan produktivitas ekonomi di tingkat daerah (Azahary *et al.*, 2025). Penyaluran dana bantuan sosial ditujukan mampu menjaga daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDRB.

Pengelolaan anggaran yang akuntabel menjamin bahwa bantuan sosial diatribusikan tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Jika anggaran dikelola secara transparan dan efisien, dana tersebut akan segera mengalir ke pasar lokal, meningkatkan permintaan agregat, dan mendorong pertumbuhan PDRB. Sebaliknya, jika terjadi keterlambatan distribusi atau inefisiensi anggaran akibat tata kelola yang buruk, potensi bantuan

sosial dalam menstimulus ekonomi lokal akan terhambat.

Lubinga *et al.* (2026) memotret hambatan struktural dan implementasi dapat mengurangi kemampuan program perlindungan sosial dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Temuan ini mengisyaratkan bahwa manfaat ekonomi dari bantuan sosial, termasuk peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap PDRB, akan lebih optimal apabila didukung oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah bertindak sebagai katalis yang mengoptimalkan dampak dana bantuan sosial terhadap peningkatan PDRB daerah. Hipotesis dalam studi ini:

H8: transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memoderasi hubungan antara dana bantuan sosial terhadap produk domestik regional bruto

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Dana Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana bantuan sosial diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dana bantuan sosial dirancang untuk memastikan kelompok rentan dapat mengakses layanan dasar tersebut. Dalam kerangka pembangunan manusia, belanja sosial pemerintah berfungsi memperluas akses kelompok rentan terhadap layanan dasar yang menjadi prasyarat utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (UNDP, 2019 dan World Bank, 2020). Hubungan antara dana bantuan sosial dan peningkatan IPM bergantung pada kualitas tata kelola atau akuntabilitas anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bertujuan memastikan efektivitas dana publik dan meminimalkan potensi penyalahgunaan (Daud *et al.*, 2022). Ketika akuntabilitas tinggi, terdapat pengawasan intens sehingga dana tersebut secara nyata digunakan untuk investasi modal manusia

(*human capital investment*). Hal ini memperkuat pengaruh positif dana bantuan sosial terhadap pencapaian IPM. Sebaliknya, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, bantuan sosial mungkin hanya menjadi transfer konsumsi jangka pendek yang tidak memberikan dampak berkelanjutan pada kualitas manusia di suatu daerah. Hasil penelitian Girardi *et al.* (2025) mendapati bahwa tata kelola yang berorientasi pada *stewardship* berperan penting dalam memastikan bahwa manfaat program publik dapat diterima secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kualitas tata kelola yang baik memungkinkan sumber daya publik dikonversi menjadi manfaat sosial yang lebih besar, termasuk mendorong kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah diperkirakan akan memperkuat hubungan antara dana publik dan peningkatan IPM. Dengan demikian, peneliti menyusun hipotesis dalam studi ini:

H9: transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memoderasi hubungan antara dana bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana desa secara teoritis bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur dasar. Namun, efektivitas dana tersebut dalam menekan angka kemiskinan bergantung pada bagaimana anggaran dikelola. Dalam perspektif teori keagenan, transparansi dan akuntabilitas bertindak sebagai mekanisme kontrol yang memastikan agen (pemerintah desa) bertindak demi kepentingan prinsipal (masyarakat desa).

Warokka *et al.* (2025) mendapati bahwa tantangan utama pengelolaan dana desa di daerah tertinggal terletak pada aspek tata kelola dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas yang baik

dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran serta memastikan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan benar-benar menjangkau kelompok miskin. Oleh karena itu, kualitas akuntabilitas diyakini memperkuat pengaruh dana desa terhadap penurunan kemiskinan. Di sisi lain, Rohim *et al.* (2026) menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan, kapasitas kelembagaan lokal, dan sistem monitoring yang memadai. Temuan tersebut mempertegas transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam memperkuat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam mengurangi kemiskinan.

Sementara itu, studi terbaru oleh Basri *et al.* (2026) menemukan bahwa dukungan nonfinansial pemerintah berupa regulasi, pelatihan, koordinasi, pendampingan, dan pengawasan memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan organisasi desa dan menghasilkan dampak sosial yang lebih baik. Temuan ini memotret efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya dihitung oleh besarnya anggaran, tetapi juga melalui kualitas tata kelola, pembinaan, dan mekanisme pengawasan yang menjamin penggunaan dana secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Akuntabilitas pemerintah daerah yang tinggi menjamin bahwa program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan bebas dari kebocoran anggaran. Dengan adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas, dana desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga fungsional dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas, dana desa cenderung mengalami misalokasi, sehingga meskipun jumlah dana besar, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas diposisikan sebagai proksi yang memperkuat pengaruh dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hipotesis dalam studi ini:

H10 : transparansi dan akuntabilitas

akuntansi pemerintah daerah memoderasi hubungan antara dana desa terhadap tingkat kemiskinan

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Dana Desa terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Dana desa diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian lokal yang pada akhirnya meningkatkan PDRB. Namun, hubungan ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola keuangan. Transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah berperan sebagai variabel moderasi yang memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dialokasikan pada sektor-sektor produktif dan investasi riil di tingkat desa. Ketika pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas, penggunaan dana untuk pembangunan pasar desa, jalan usaha tani, maupun dukungan BUMDes akan dilakukan secara efisien tanpa pemborosan. Hal ini memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi regional yang lebih solid. Penelitian sebelumnya sering menunjukkan hasil yang beragam mengenai dampak dana desa terhadap PDRB. Hal ini diduga karena adanya perbedaan level akuntabilitas di tiap daerah.

Lubinga *et al.* (2026) mendapati bahwa tantangan struktural dan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program ekonomi masyarakat. Temuan ini mengungkap kontribusi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi regional dapat menjadi lebih besar apabila didukung oleh sistem akuntabilitas yang mampu meminimalkan inefisiensi dan memastikan penggunaan anggaran pada kegiatan produktif. Di sisi lain, Penelitian Basri *et al.* (2026) mendapati bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pelatihan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi organisasi desa melalui keberlanjutan kelembagaan. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan

memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan pada aktivitas produktif yang menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Widiastuti *et al.* (2026) mengungkap bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya mendorong kinerja organisasi desa, tetapi juga mendorong inovasi sosial yang menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya desa berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap menguatnya PDRB. Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan mengoptimalkan potensi dana desa dalam mendorong produktivitas masyarakat, sehingga memperkuat kontribusi dana desa terhadap peningkatan PDRB. Hipotesis dalam studi ini:

H11 : transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memoderasi hubungan antara dana desa terhadap produk domestik regional bruto

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan IPM melalui dana desa memerlukan konsistensi dalam pendanaan sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Hubungan antara dana desa dan IPM seringkali tidak signifikan karena adanya "jarak" antara pengeluaran anggaran dan hasil nyata di lapangan. Disinilah transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah berperan penting sebagai variabel moderasi.

Rohim *et al.* (2026) menekankan pentingnya sistem monitoring yang terstandarisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan desa. Dalam konteks pembangunan manusia, transparansi dan akuntabilitas akan memastikan dana desa dialokasikan untuk program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sehingga memperkuat pengaruh dana desa terhadap peningkatan IPM. Hasil temuan

Widiastuti *et al.* (2026) menyoroti akuntabilitas dan transparansi mampu mendorong inovasi sosial yang meningkatkan kinerja organisasi berbasis masyarakat desa. Inovasi sosial tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, tata kelola yang transparan dan akuntabel diperkirakan akan memperkuat implikasi dana desa terhadap peningkatan kualitas hidup.

Akuntabilitas memastikan bahwa alokasi anggaran untuk layanan dasar publik (seperti posyandu, sanitasi, dan sarana pendidikan desa) benar-benar terealisasi dan berkualitas. Dengan akuntabilitas yang tinggi, pengawasan publik terhadap kualitas program pembangunan manusia meningkat, sehingga meminimalkan risiko proyek fiktif atau pembangunan fisik yang tidak bermanfaat. Dengan demikian, transparansi dan tingkat akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat hubungan antara besaran dana desa yang dikelola dengan capaian IPM di wilayah tersebut. Hipotesis studi ini:

H12: transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memoderasi hubungan antara dana desa terhadap indeks pembangunan manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Aminy (2021) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif berasal dari aliran positivisme yang dikembangkan Auguste Comte, yang mendorong penggunaan metode ilmu alam dalam ilmu sosial. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh dana bantuan sosial dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, PDRB, serta IPM. Selain itu, penelitian ini memasukkan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah sebagai variabel moderasi yang diproseskan melalui opini

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Unit analisis mencakup pengamatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa selama periode pengamatan tahun 2020–2024.

Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Definisi operasional pada setiap variabel adalah sebagai Tabel 1. Analisis dalam studi ini menggunakan bantuan *software IBM SPSS Statistics*. Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang menitikberatkan pada pengujian pengaruh simultan dan efek moderasi variabel kebijakan fiskal terhadap kemiskinan, PDRB, dan IPM pada level kabupaten/kota, serta kebutuhan uji asumsi klasik dan pengolahan variabel komposit, maka SPSS dinilai lebih tepat dan efisien sebagai alat bantu dalam penelitian ini. SPSS lebih unggul dalam analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA), termasuk kemudahan pembuatan variabel interaksi serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) secara terintegrasi dan *user-friendly*. Selain itu, apabila variabel transparansi dan akuntabilitas dibentuk dari beberapa indikator, SPSS menyediakan fasilitas yang lebih komprehensif. Pada pengujian ini ditentukan tingkat signifikansi atau batas toleransi kesalahan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Model regresi linier berganda studi ini dirumuskan sebagai berikut:

Model 1 (Tingkat Kemiskinan):

$$TK_{i,t} = \alpha + \beta_1 DBS_{i,t} + \beta_2 DD_{i,t} + e$$

Model 2 (PDRB):

$$PDRB_{i,t} = \alpha + \beta_1 DBS_{i,t} + \beta_2 DD_{i,t} + e$$

Model 3 (IPM):

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 DBS_{i,t} + \beta_2 DD_{i,t} + e$$

Keterangan: α = Konstanta, β_1 = Koefisien regresi Dana Bantuan Sosial, β_2 = Koefisien regresi Dana Desa, e = error, $i = 1,2,3,\dots, n$ (pemda di Pulau Jawa yang diobservasi), $t = 1,2,3,\dots, t$ (tahun observasi dari 2020–2024).

Pengujian moderasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Process Macro* yang dikembangkan oleh

Hayes (2018) pada perangkat lunak SPSS. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengestimasi pengaruh interaksi secara langsung serta menyediakan hasil yang lebih *robust* melalui metode *bootstrapping*, sehingga meningkatkan akurasi estimasi koefisien regresi (Hayes, 2018). Selain itu, penggunaan *Process Macro* memungkinkan pengujian efek moderasi tanpa harus melakukan transformasi variabel secara manual. Model regresi moderasi dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 DBS_{i,t} + \beta_2 DD_{i,t} + \beta_3 TAAP_{i,t} + \beta_4 (DBS * TAAP)_{i,t} + \beta_5 (DD * TAAP)_{i,t} + e$$

Keterangan: α = Konstanta, β_1 = Koefisien regresi Dana Bantuan Sosial, β_2 = Koefisien regresi Dana Desa, β_3 = Koefisien Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah, β_4 = Koefisien interaksi Dana Bantuan Sosial dengan Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah, β_5 = Koefisien interaksi Dana Desa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah, e = *error*, i = 1,2,3,..., n (pemda di Pulau Jawa yang diobservasi), t = 1,2,3,..., t (tahun observasi dari 2020-2024).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan *overview* karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Data penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif meliputi tinjauan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku untuk setiap variabel.

Ukuran sampel penelitian (N) sebanyak 315 pengamatan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2020-2024. Variabel dependen dalam studi ini terdiri atas tingkat kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independennya adalah dana bantuan sosial dan dana desa.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2, variabel dana bantuan sosial memiliki nilai minimum sebesar Rp282,00 juta dan nilai maksimum sebesar Rp379.796,00 juta, dengan rata-rata sebesar Rp21.035,45 juta serta simpangan baku sebesar Rp35.396,95 juta. Nilai simpangan baku yang lebih besar dibandingkan rata-ratanya mengungkap adanya variasi yang cukup tinggi dalam alokasi bantuan sosial antar pemerintah daerah. Kondisi ini menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah, jumlah penduduk penerima manfaat, tingkat kemiskinan, dan prioritas kebijakan tiap daerah memengaruhi besaran bantuan sosial yang direalisasikan.

Variabel dana desa menunjukkan nilai minimum sebesar Rp20.668,00 juta dan nilai maksimum sebesar Rp517.897,00 juta, dengan rata-rata sebesar Rp273.946,65 juta serta simpangan baku sebesar Rp96.573,55 juta. Rentang nilai yang relatif lebar menunjukkan adanya perbedaan kapasitas penerimaan dana desa antar daerah yang dipengaruhi oleh jumlah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan karakteristik

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Sumber Data	Perhitungan
Tingkat Kemiskinan (TK)	Badan Pusat Statistik	Rasio Jumlah Penduduk Miskin dibanding Jumlah Penduduk
PDRB	Badan Pusat Statistik	Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun berjalan (PDRB ADHB)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Badan Pusat Statistik	Tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah
Dana Bantuan Sosial (DBS)	LKPD <i>Audited</i>	Jumlah rupiah realisasi anggaran dana bantuan sosial dalam 1 tahun anggaran pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota
Dana Desa (DD)	LKPD <i>Audited</i>	Jumlah rupiah realisasi anggaran dana desa dalam 1 tahun anggaran setiap Pemerintah Kabupaten/Kota
Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah (TAAP)	LKPD <i>Audited</i>	Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

geografis sebagaimana diatur dalam formula pengalokasian dana desa. Besarnya nilai rata-rata dana desa dibandingkan dana bantuan sosial juga mencerminkan dana desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki porsi anggaran cukup besar dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Pada variabel tingkat kemiskinan, nilai minimum tercatat sebesar 3 persen dan nilai maksimum sebesar 33 persen, dengan rata-rata sebesar 10,75 persen serta simpangan baku sebesar 4,05 persen. Hasil ini menjelaskan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Pulau Jawa masih cukup bervariasi. Meskipun secara rata-rata tingkat kemiskinan berada pada kisaran 10,75 persen, terdapat daerah yang memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah dan terdapat pula daerah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan yang cukup tinggi. Variasi tersebut mencerminkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi antar daerah.

Variabel PDRB memiliki nilai minimum sebesar Rp11.498.000,00 juta dan nilai maksimum sebesar Rp309.843.000,00 juta, dengan rata-rata sebesar Rp55.732.726,98 juta dan simpangan baku sebesar Rp52.487.840,76 juta. Besarnya rentang nilai dan simpangan baku menjelaskan adanya ketimpangan aktivitas ekonomi antar daerah di Pulau Jawa. Beberapa daerah memiliki kapasitas ekonomi yang sangat besar karena didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang, sementara daerah lainnya masih memiliki

basis ekonomi yang relatif lebih kecil. Kondisi ini mencerminkan karakteristik pembangunan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya merata.

Sementara itu, variabel IPM memiliki nilai minimum sebesar 62,70 dan nilai maksimum sebesar 82,31, dengan rata-rata sebesar 71,01 serta simpangan baku sebesar 3,51. Nilai rata-rata tersebut mengungkap bahwa secara umum kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Pulau Jawa berada pada kategori sedang hingga tinggi. Simpangan baku yang relatif kecil dibandingkan variabel lainnya mengindikasikan bahwa variasi IPM antar daerah cenderung lebih rendah dibandingkan variasi tingkat kemiskinan maupun aktivitas ekonomi daerah. Temuan ini menyimpulkan bahwa capaian pembangunan manusia di Pulau Jawa relatif lebih merata dibandingkan distribusi kesejahteraan ekonomi.

Selain variabel utama penelitian, penelitian ini juga menggunakan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah sebagai variabel moderasi yang diproksikan menggunakan opini BPK atas LKPD. Berdasarkan tabel 3, dari total 315 observasi, sebanyak 310 observasi atau 98,40 persen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan hanya 5 observasi atau 1,60 persen yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dominasi opini WTP menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Pulau Jawa telah mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundangan. Temuan ini sekaligus mendapati tingkat transparansi dan

Tabel 2.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bantuan Sosial	315	282,00	379.796,00	21.035,45	35.396,95
Dana Desa	315	20.668,00	517.897,00	273.946,65	96.573,55
Tkt Kemiskinan	315	3,00	33,00	10,75	4,05
PDRB	315	11.498.000,00	309.843.000,00	55.732.726,98	52.487.840,76
IPM	315	62,70	82,31	71,01	3,51

Keterangan: Bantuan Sosial, Dana Desa, dan PDRB (jutaan rupiah), tingkat kemiskinan (persen)

akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah di Pulau Jawa secara umum tergolong baik. Namun demikian, distribusi data yang sangat terkonsentrasi pada opini WTP juga mensinyalir rendahnya variasi data pada variabel moderasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan variabel transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah dalam menjelaskan atau memoderasi hubungan antara dana bantuan sosial, dana desa, dan indikator pembangunan daerah yang menjadi fokus penelitian.

Pengujian Hipotesis

Sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik yang dipersyaratkan dalam analisis regresi. Hasil uji normalitas melalui grafik histogram dan Normal *Probability Plot* (PP-Plot) menyimpulkan bahwa residual pada ketiga model regresi (tingkat kemiskinan, PDRB, dan IPM) terdistribusi normal, yang ditandai dengan pola histogram yang tidak menceng serta sebaran titik residual yang mengikuti garis diagonal. Selanjutnya, uji multikolinearitas membuktikan tidak adanya korelasi tinggi antara variabel independen, tercermin dari nilai *tolerance* sebesar 0,988 ($>0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,012 (<10) untuk seluruh variabel. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas melalui *Scatterplot* memperlihatkan bahwa titik-titik residual menyebar acak di sekitar sumbu nol dan tidak membentuk pola tertentu, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sehingga seluruh model regresi dinyatakan lolos uji asumsi klasik dan layak dilakukan analisis lebih lanjut.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model Y1 (Tingkat Kemiskinan) memiliki nilai R^2 sebesar 0.163. Hal ini berarti faktor

-faktor yang berkaitan dengan bantuan sosial dan dana desa menjelaskan 16,3% variasi dalam tingkat kemiskinan, sementara variabel lain menjelaskan 83,7%. Menurut Model Y2 (PDRB) nilai R^2 adalah 0,209. Bantuan sosial dan dana desa menjelaskan 20,9% variasi dalam PDRB, sedangkan variabel lain yang menjelaskan 79,1% variasi tidak tercakup dalam model studi. Sementara itu, pada Model Y3 (IPM), nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,097. Hal ini menggambarkan bahwa 9,7% variasi IPM dapat dijelaskan melalui variabel dana bantuan sosial dan dana desa, sedangkan 90,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar studi ini.

Berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya peneliti melakukan uji statistik t dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) selama uji dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Variabel independen (bebas) dikatakan memiliki pengaruh signifikan dengan variabel dependen (terikat) apabila nilai Sig. kurang dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4, dana bantuan sosial dan dana desa menunjukkan dampak yang berbeda terhadap tingkat kemiskinan, PDRB, dan IPM. Pada model tingkat kemiskinan (Y1), dana bantuan sosial memiliki nilai t sebesar -3,654 dengan tingkat signifikansi $<0,05$, yang menyimpulkan dana bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana bantuan sosial efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, dana desa memiliki nilai t sebesar 7,243 dengan tingkat signifikansi $<0,05$, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menjadi sinyal bahwa peningkatan dana desa belum mampu berkontribusi pada penurunan kemiskinan, yang diduga disebabkan oleh pemanfaatan dana desa yang masih belum optimal dalam mendukung program-program penurunan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pada model PDRB (Y2), dana bantuan sosial memiliki nilai t sebesar 5,807 dengan tingkat signifikansi $<0,05$, sehingga terbukti berpengaruh positif terhadap

Tabel 3.

Distribusi Frekuensi Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Opini	Frekuensi (n)	Persentase (%)
WTP	310	98,40
WDP	5	1,60
Total	315	100,00

PDRB. Temuan ini menjadi sinyalemen bahwa peningkatan dana bantuan sosial tidak sekedar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat. Dana desa juga berpengaruh positif terhadap PDRB dengan nilai t sebesar 6,293 dan tingkat signifikansi $<0,05$. Hasil tersebut disinyalir bahwa dana desa berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung ekonomi di tingkat desa yang mampu memperlancar mobilitas barang, jasa, dan faktor produksi.

Sementara itu, pada model IPM (Y3), dana bantuan sosial memiliki nilai t sebesar 3,468 dengan tingkat signifikansi $<0,05$, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM. Hasil ini mengindikasikan bahwa dana bantuan sosial berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, dana desa memiliki nilai t sebesar -4,972 dengan tingkat signifikansi $<0,05$, yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap IPM. Temuan ini dimaknai bahwa peningkatan dana desa belum mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara optimal. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh dominannya penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik dan

infrastruktur, sementara alokasi untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih relatif terbatas. Dengan demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa dana bantuan sosial secara konsisten berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan serta peningkatan PDRB dan IPM, sedangkan dana desa lebih efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, namun belum efektif dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Uji Moderasi *Process Macro*

Pengujian moderasi dilakukan dengan melihat nilai koefisien interaksi (*interaction term*), nilai signifikansi (p -value), serta interval kepercayaan *Lower Level Confidence Interval* (LLCI) dan *Upper Level Confidence Interval* (ULCI). Suatu efek moderasi dinyatakan signifikan apabila nilai $p < 0,05$ serta interval kepercayaan antara ULCI dengan LLCI tidak melewati angka nol.

Berdasarkan hasil uji moderasi menggunakan *Process Macro* Andrew F. Hayes pada tabel 5, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara dana bantuan sosial maupun dana desa dengan tingkat kemiskinan, PDRB, dan IPM. Pada model tingkat kemiskinan (Y1), interaksi antara dana bantuan sosial dengan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah menghasilkan nilai

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t

Model	Variabel	t	<i>Sig.</i>	Hipotesis
Y1 (Tingkat Kemiskinan) Ftest: 0,000; R2= 0,163	(<i>Constant</i>)	-3,562	0,000	-
	Dana Bansos	-3,654	0,000	Terdukung
	Dana Desa	7,243	0,000	Tidak Terdukung
Y2 (PDRB) Ftest: 0,000; R2=0,209	(<i>Constant</i>)	7,631	0,000	
	Dana Bansos	5,807	0,000	Terdukung
	Dana Desa	6,293	0,000	Terdukung
Y3 (IPM) Ftest: 0,000; R2=0,097	(<i>Constant</i>)	10,132	0,000	-
	Dana Bansos	3,468	0,001	Terdukung
	Dana Desa	-4,972	0,000	Tidak Terdukung

koefisien sebesar 0,293 dengan nilai p sebesar 0,388, sedangkan interaksi antara dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,016 dengan nilai p sebesar 0,950. Kedua interaksi tersebut memiliki interval kepercayaan yang mencakup angka nol, sehingga membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara dana bantuan sosial maupun dana desa terhadap kemiskinan.

Hasil yang serupa juga ditemukan pada model PDRB (Y2). Interaksi antara dana bantuan sosial dengan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,073 dengan nilai p sebesar 0,905, sedangkan interaksi antara dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,208 dengan nilai p sebesar 0,671. Seluruh interval kepercayaan pada model ini juga melewati angka nol, yang mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh dana bantuan sosial dan dana desa terhadap aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB.

Pada model IPM (Y3), interaksi antara dana bantuan sosial dengan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah menghasilkan nilai koefisien sebesar -2,132 dengan nilai p sebesar

0,520, sedangkan interaksi antara dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah memiliki nilai koefisien sebesar 2,164 dengan nilai p sebesar 0,405. Sebagaimana pada model sebelumnya, interval kepercayaan kedua interaksi tersebut juga mencakup angka nol, sehingga efek moderasi tidak terbukti secara statistik.

Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak berperan dalam memoderasi pengaruh dana bantuan sosial maupun dana desa terhadap rasio kemiskinan, PDRB, dan IPM. Temuan ini menjadi sinyal bahwa hubungan antara kedua instrumen fiskal tersebut (dana bantuan sosial dan dana desa) dengan indikator pembangunan daerah cenderung bersifat langsung, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan tingkat transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah selama periode pengamatan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian membuktikan bahwa dana bantuan sosial memberikan efek negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya hipotesis pertama (H1) terdukung. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Lindiasari dan Ramadhani (2019) serta Anisa *et al.* (2025). Pengaruh negatif yang tercermin dari hasil regresi mengindikasikan bahwa peningkatan

Tabel 5.
Hasil Uji Moderasi *PROCESS Macro* Andrew F. Hayes

Model	Variabel	coeff	se	p	LLCI	ULCI	Hipotesis
Y1 (Tingkat Kemiskinan)	Int (DBS*TAAP)	0,293	0,339	0,388	-0,374	0,960	Tidak terdukung
	Int (DD*TAAP)	-0,016	0,257	0,950	-0,522	0,490	Tidak terdukung
Y2 (PDRB)	Int (DBS*TAAP)	0,073	0,614	0,905	-1,135	1,282	Tidak terdukung
	Int (DD*TAAP)	0,208	0,490	0,671	-0,755	1,172	Tidak terdukung
Y3 (IPM)	Int (DBS*TAAP)	-2,132	3,312	0,520	-8,648	4,385	Tidak terdukung
	Int (DD*TAAP)	2,164	2,596	0,405	-2,944	7,271	Tidak terdukung

realisasi dana bantuan sosial oleh pemerintah daerah secara nyata telah efektif dalam menurunkan persentase penduduk miskin di wilayah tersebut, begitupun sebaliknya. Sementara itu, temuan ini tidak mendukung penelitian Agustin dan Sumarsono (2022), serta Salsabila *et al.* (2024).

Secara konseptual, dana bantuan sosial dirancang sebagai instrumen *social safety net* yang bermaksud melindungi kelompok rentan, seperti kehilangan pekerjaan, inflasi harga kebutuhan pokok, maupun dampak krisis ekonomi. Sejalan dengan Lubinga *et al.* (2026), perlindungan sosial menjadi instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat rentan dan membantu rumah tangga menghadapi berbagai risiko sosial-ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan program dalam menjangkau kelompok sasaran dan mengatasi berbagai hambatan implementasi yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana bantuan sosial sebagai instrumen fiskal yang efektif menekan tingkat kemiskinan dalam jangka menengah. Namun pada implementasinya perlu dilakukan secara akuntabel agar tidak terjadi *fraud* dalam pertanggungjawaban setiap program yang didanai dari dana bantuan sosial. Temuan ini senada dengan Teori Keagenan yang menerangkan pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan sumber daya publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsipal. Keberhasilan dana bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan mendapati bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan mandat tersebut secara efektif. Dari perspektif Teori Legitimasi, keberhasilan program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat karena kebijakan yang dijalankan menghasilkan manfaat nyata. Sementara itu, *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dapat

memperkuat keyakinan pemerintah daerah dan mendorong komitmen dan perilaku pengelolaan program sosial yang lebih baik pada periode berikutnya.

Pengaruh Dana Bantuan Sosial Terhadap PDRB

Hasil pengujian menyimpulkan bahwa dana bantuan sosial terbukti memberikan pengaruh positif terhadap PDRB, maka dari itu hipotesis kedua (H2) juga terdukung. Hasil ini konsisten dengan studi Sumiyarti (2022) dan Rizki *et al.* (2023). Pengaruh positif yang ditunjukkan dari hasil regresi diartikan bahwa semakin tinggi dana bantuan sosial yang direalisasikan maka efektif menopang aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, begitupun sebaliknya. Temuan ini menguatkan bahwa kenaikan realisasi dana bantuan sosial tidak hanya berimbas pada kesejahteraan individu, tetapi mampu menyokong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara ekonomi makro, dana bantuan sosial dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, utamanya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan *marginal propensity to consume* (kecenderungan konsumsi marjinal) yang tinggi. Artinya, ukuran ekonomi yang menunjukkan berapa banyak dari setiap tambahan penerimaan yang diterima seseorang atau rumah tangga yang akan dihabiskan untuk konsumsi (membeli barang dan jasa), bukan ditabung. Peningkatan konsumsi ini kemudian mendorong perputaran ekonomi lokal, meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta berdampak positif terhadap *output* regional yang tercermin dalam peningkatan PDRB. Dengan PDRB yang meningkat, pemerintah daerah mempunyai kapasitas fiskal yang lebih banyak dalam mendanai pelayanan publik dan pembangunan, sehingga tercipta siklus pembangunan yang berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan pandangan Lubinga *et al.* (2026) bahwa program perlindungan sosial tidak sekedar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko sosial, melainkan berkontribusi memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat

lokal. Hasil ini memperlihatkan peningkatan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dapat menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya terproksikan dalam peningkatan PDRB, sebagaimana teori ekonomi yang juga digunakan oleh Setiawan *et al.* (2026).

Temuan ini juga memperkuat Teori Keagenan yang menempatkan pemerintah daerah sebagai agen yang bertugas mengalokasikan anggaran publik untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengaruh positif dana bantuan sosial terhadap PDRB menjadi sinyallemen pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan fungsi distribusi fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dari sudut pandang Teori Legitimasi, peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam kenaikan PDRB menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi. Selanjutnya, TPB menjelaskan bahwa persepsi keberhasilan program bantuan sosial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan memperkuat sikap dan niat pemerintah daerah dalam mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas program tersebut di masa mendatang.

Pengaruh Dana Bantuan Sosial Terhadap IPM

Hasil pengujian mencerminkan bahwa dana bantuan sosial terbukti berpengaruh positif terhadap IPM, maka dari itu hipotesis ketiga (H3) terdukung. Temuan ini senada dengan tujuan dana bantuan sosial yang diharapkan mampu menekan ketimpangan sosial, menyokong akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan IPM. Temuan ini relevan dengan Setiawan *et al.* (2026) yang menekankan urgensi peningkatan kualitas modal manusia sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Akses yang membaik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak melalui bantuan sosial berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terproksikan melalui peningkatan IPM. Namun, temuan ini tidak mendukung penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Septiani (2022), Astuti (2023), serta Harsono *et al.* (2024).

Pengaruh positif yang ditunjukkan dari hasil regresi diartikan bahwa semakin tinggi besaran dana bantuan sosial yang direalisasikan oleh pemerintah daerah maka efektif untuk meningkatkan IPM di wilayah tersebut, begitupun sebaliknya. Temuan ini membuktikan bahwa bantuan sosial berkontribusi mendorong kualitas hidup masyarakat secara multidimensi. IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dana bantuan sosial memungkinkan rumah tangga miskin untuk mengakses layanan kesehatan, mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak, serta memenuhi kebutuhan hidup dasar. Lubinga *et al.* (2026) menegaskan bahwa sistem perlindungan sosial berperan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga keberhasilan bantuan sosial dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia.

Temuan ini juga selaras dengan maksud belanja bantuan sosial sebagaimana diatur dalam kebijakan perundangan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, dana bantuan sosial terbukti tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan berdampak terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Lebih lanjut, temuan ini sesuai dengan Teori Keagenan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Peningkatan IPM sebagai dampak dari bantuan sosial membuktikan bahwa pemerintah mampu mengelola sumber daya publik secara efektif dalam menyokong kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Teori Legitimasi, keberhasilan meningkatkan IPM menjadi salah satu bentuk pemenuhan kontrak sosial antara

pemerintah dan masyarakat sehingga dapat memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Adapun menurut TPB, keberhasilan bantuan sosial dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat akan memperkuat persepsi positif pemerintah terhadap efektivitas program sehingga mendorong keberlanjutan kebijakan sosial yang lebih terarah.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian mencerminkan bahwa dana desa secara statistik memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, maka dari itu hipotesis keempat (H4) tidak terdukung. Temuan ini sejalan dengan Muliza (2022) serta Qudri dan Sari (2023) yang menyoroti bahwa pemanfaatan dana desa masih dominan untuk proyek infrastruktur tanpa didukung dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan *output* pembangunan tidak terkonversi secara optimal menjadi *outcome* berupa penurunan kemiskinan. Sementara itu, temuan ini tidak selaras dengan studi Suherman *et al.* (2024).

Pengaruh positif yang tercermin dari hasil regresi diartikan bahwa dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah daerah tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil ini menjadi sinyal bahwa dana desa belum sepenuhnya efektif dalam penurunan kemiskinan. Salah satu pemicu yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah dominasi penggunaan dana desa pada pembangunan infrastruktur fisik yang manfaatnya bersifat jangka panjang dan tidak langsung dirasakan oleh rumah tangga miskin. Temuan ini senada dengan Shalahuddin *et al.* (2026) yang mendapati pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan dan investasi wilayah pedesaan tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan. Infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang berkembang cenderung menghasilkan manfaat yang terkonsentrasi pada kelompok atau lokasi tertentu (*enclave development*), sehingga dampaknya terhadap penurunan

kemiskinan menjadi terbatas apabila tidak disertai peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi.

Dana desa diberikan berdasarkan perhitungan yang memperhatikan jumlah desa, penduduk, kemiskinan, luas daerah, dan kondisi geografis. Namun dengan hasil studi ini menggambarkan bahwa dana desa belum efektif dalam menurunkan kemiskinan. Keberadaan dana desa diharapkan mampu mendorong sumber pendapatan desa. Tambahan dana yang dialokasikan oleh pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, seperti ketercukupan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan berbagai kegiatan desa.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan yang mendeskripsikan potensi perbedaan kepentingan prinsipal dan agen. Pemerintah desa sebagai agen cenderung mengalokasikan dana desa pada pembangunan fisik yang manfaatnya lebih terlihat secara administratif, sementara kebutuhan masyarakat miskin sebagai prinsipal belum sepenuhnya terakomodasi. Dari perspektif Teori Legitimasi, ketidakmampuan dana desa dalam menurunkan kemiskinan menginformasikan manfaat program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sehingga legitimasi pemerintah desa masih menghadapi tantangan. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa orientasi perilaku pemerintah desa lebih berfokus pada pembangunan fisik dibanding pemberdayaan masyarakat. Dampaknya, tujuan pengurangan kemiskinan belum tercapai secara optimal.

Pengaruh Dana Desa Terhadap PDRB

Hasil pengujian membuktikan bahwa dana desa memberikan pengaruh positif terhadap PDRB, maka dari itu hipotesis kelima (H5) terdukung. Hasil studi ini konsisten dengan penelitian Rahim (2022), dan Manggala dan Yulianty (2024). Pengaruh positif yang ditunjukkan dari hasil regresi diartikan bahwa semakin tinggi dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah daerah, akan meningkatkan

aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, begitupun sebaliknya. Hasil tersebut memotret pembangunan infrastruktur melalui dana desa lebih cepat tercermin pada peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan pada penurunan kemiskinan, sebagaimana juga ditemukan oleh Shalahuddin *et al.* (2026).

Dana desa untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana ekonomi, seyogyanya mampu meningkatkan konektivitas dan menekan biaya distribusi. Kondisi ini mengakselerasi aktivitas produksi dan perdagangan, yang pada akhirnya tercermin dalam tingginya aktivitas ekonomi (PDRB). Temuan ini selaras dengan Setiawan *et al.* (2026) yang mendapati pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif melalui akumulasi modal dan pembangunan yang mendukung peningkatan produktivitas. Infrastruktur desa berpotensi menjadi salah satu bentuk investasi publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Hasil ini selaras dengan Teori Keagenan yang menterjemahkan pemerintah desa sebagai agen telah mampu memanfaatkan dana desa untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Teori Legitimasi, peningkatan PDRB yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa dapat menguatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa karena pembangunan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Selanjutnya, TPB menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa dalam mendorong aktivitas ekonomi akan memperkuat keyakinan pemerintah desa mengenai efektivitas kebijakan yang dijalankan sehingga mendorong keberlanjutan program pembangunan serupa.

Pengaruh Dana Desa Terhadap IPM

Hasil pengujian membuktikan dana desa berpengaruh negatif terhadap IPM, maka dari itu hipotesis keenam (H6) tidak

terdukung. Artinya, dana desa belum mampu mendorong kualitas pembangunan manusia. Temuan ini senada dengan Pandiangan *et al.* (2021) serta Hardianto *et al.* (2024) yang menyimpulkan dana desa tidak berdampak pada peningkatan IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, temuan ini tidak mendukung studi Rahim (2022) serta Manggala dan Yulianty (2024).

Nilai negatif dari hasil pengujian diartikan bahwa semakin tinggi dana desa tidak berdampak pada peningkatan IPM di wilayah tersebut. Secara empiris, hasil ini dapat dijelaskan oleh masih terbatasnya pagu dana desa dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Fokus pembangunan yang lebih besar pada infrastruktur fisik menyebabkan peningkatan IPM tidak terjadi secara langsung, bahkan berpotensi menurunkan kualitas layanan sosial apabila tidak diimbangi dengan belanja nonfisik. Shalahuddin *et al.* (2026) juga mendapati bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial secara langsung. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat sangat bergantung pada kemampuan infrastruktur tersebut dalam menciptakan akses yang lebih luas atas layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang inklusif.

Temuan ini mengungkap meskipun dana desa mampu mendorong aktivitas ekonomi, namun belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Hasil ini sejalan dengan Kafabih dan Utami (2024) yang menemukan bahwa dana desa tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, meskipun berkontribusi terhadap pembangunan desa dan aktivitas ekonomi. Temuan ini mendukung argumen bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Dalam perspektif Teori Keagenan, kondisi tersebut mensinyalir bahwa prioritas penggunaan dana desa oleh agen belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pandiangan *et al.* (2021) mengemukakan bahwa dana

desa mampu mengurangi kesenjangan pembangunan manusia desa/kota, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dikelola. Temuan ini memperjelas peningkatan IPM memerlukan prioritas kebijakan yang secara langsung menyasar aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Teori Legitimasi, kegagalan meningkatkan IPM berpotensi mengurangi persepsi positif masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa fokus perilaku pemerintah desa yang lebih besar pada pembangunan fisik menyebabkan aspek pembangunan manusia belum menjadi prioritas utama, sehingga dampaknya terhadap IPM belum optimal.

Transparansi dan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah Daerah Memoderasi Pengaruh Dana Bantuan Sosial dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan, PDRB, dan IPM

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 terlihat bahwa transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak berperan memoderasi dalam interaksi dana bantuan sosial dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, PDRB dan IPM. Maka dari itu hipotesis ketujuh (H7) sampai dengan hipotesis duabelas (H12) tidak terdukung. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak signifikannya peran moderasi transparansi dan akuntabilitas dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan. Meskipun transparansi dan akuntabilitas menjadi alat pengendalian yang dirancang untuk mengeliminasi asimetri informasi pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, keberadaan mekanisme formal tersebut belum cukup untuk menjamin tercapainya *outcome* pembangunan yang lebih baik.

Dari perspektif Teori Legitimasi, transparansi dan akuntabilitas yang bersifat administratif belum mampu meningkatkan legitimasi pemerintah secara substantif karena masyarakat cenderung menilai keberhasilan pemerintah dari hasil nyata program, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan PDRB, dan

peningkatan IPM. Selanjutnya, TPB menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki niat dan sikap positif terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan dalam implementasi program serta persepsi masyarakat terhadap kualitas hasil pembangunan menyebabkan transparansi dan akuntabilitas belum mampu memperkuat hubungan antara dana bantuan sosial maupun dana desa dengan indikator kesejahteraan masyarakat.

Meskipun transparansi dan akuntabilitas penting dalam pengelolaan keuangan publik, keberadaannya belum mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh dana bantuan sosial dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, PDRB, dan IPM. Hal ini dapat disebabkan oleh penerapan transparansi yang masih bersifat administratif dan formalitas, belum menyentuh aspek kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program. Temuan ini mendapati bahwa keberhasilan program tidak hanya didasarkan oleh keberadaan mekanisme tata kelola formal, tetapi juga kualitas implementasi program di lapangan. Lubinga *et al.* (2026) mempertegas tantangan implementasi, keterbatasan pendanaan, dan hambatan struktural menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas program perlindungan sosial.

Di sisi lain, keterbatasan variasi data transparansi dan akuntabilitas antar pemerintah daerah juga dapat menyebabkan efek moderasi tidak terdeteksi secara statistik. Oleh karena itu, hasil ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk menggunakan indikator transparansi yang lebih komprehensif atau pendekatan metodologis yang berbeda.

SIMPULAN

Hasil studi menyimpulkan bahwa dana bantuan sosial berdampak negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi dana bantuan sosial yang direalisasikan oleh pemerintah daerah telah efektif dalam menekan kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, dana bantuan sosial berdampak positif terhadap PDRB dan IPM, artinya

semakin tinggi dana bantuan sosial yang direalisasikan oleh pemerintah daerah telah efektif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi (PDRB) dan meningkatkan IPM di wilayah tersebut. Sementara itu, dana desa menunjukkan tidak berdampak terhadap tingkat kemiskinan dan IPM, yang membuktikan bahwa kenaikan dana desa belum efektif dalam pengurangan kemiskinan dan belum berdampak pada peningkatan IPM. Namun demikian, dana desa tetap berpengaruh positif terhadap PDRB, yang menandakan kontribusinya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah tidak terbukti memoderasi pengaruh dana bantuan sosial maupun dana desa terhadap tingkat kemiskinan, PDRB, dan IPM. Hal ini menjadi sinyal bahwa hubungan antara dana bantuan sosial serta dana desa dengan tingkat kemiskinan dan PDRB bersifat langsung, tanpa dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pada akhirnya, efektivitas dana bantuan sosial dan dana desa lebih ditentukan oleh besaran dan arah alokasinya, bukan oleh peran variabel moderasi tersebut.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan

Studi ini masih memiliki celah yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, nilai koefisien determinasi (R^2) yang relatif rendah menandakan bahwa tingkat kemiskinan, PDRB, dan IPM masih dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar penelitian. Kedua, penggunaan opini BPK atas LKPD sebagai proksi transparansi dan akuntabilitas akuntansi pemerintah daerah belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas tata kelola secara substantif. Ketiga, rendahnya variasi data variabel moderasi, yang didominasi oleh opini WTP (98,40%), berpotensi menyebabkan efek moderasi sulit terdeteksi secara statistik. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2020–2024 sehingga simpulan umum hasil studi ke wilayah lain perlu dilakukan secara cermat.

Saran

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian mendatang disarankan memperluas wilayah penelitian hingga mencakup Pemerintah Daerah di luar Pulau Jawa agar hasilnya lebih general dan representatif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menambah proksi penjas lain, menggunakan indikator akuntabilitas yang lebih komprehensif, serta memperluas cakupan wilayah dan periode pengamatan. Penggunaan periode pengamatan yang lebih panjang sejak awal pengucuran dana desa pada tahun 2015 juga dianjurkan, sehingga dampak dana bantuan sosial dan dana desa dapat dianalisis lebih komprehensif, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Selain itu, atas dasar simpulan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, temuan studi ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi kalangan akademisi, temuan ini diharapkan memperkaya literatur dan menyajikan bukti empiris efektivitas dana bantuan sosial dan dana desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan aktivitas ekonomi dan IPM di Pulau Jawa. Bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa, temuan studi ini dapat menjadi bahan kajian perumusan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan dana bantuan sosial dan dana desa guna mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah, khususnya terkait pengurangan kemiskinan, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, dan pembangunan manusia. Temuan bahwa dana desa belum berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan IPM dapat menjadi *insight* bagi pemerintah daerah dalam melakukan penajaman (*tagging*) dan *refocusing* alokasi dana desa agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagi pemerintah daerah di luar Pulau Jawa, hasil studi ini menjadi referensi dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial dan dana desa di wilayah masing-masing, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam

merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, bagi masyarakat, temuan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang didanai dari dana bantuan sosial dan dana desa, sehingga penggunaan anggaran publik dapat berlangsung secara lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh pengangguran, IPM, dan bantuan sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 262-286. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfath, N., D., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar (2025). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 3(1), Tahun 2025. DOI: <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1050>.
- Anisa, R.N., Yusuf, A., & Siswanto, Y. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Tingkat Penurunan Kemiskinan Masyarakat Penerima Manfaat di Desa Pendem. *Kreatif : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5(2). DOI: <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.6577>.
- Azhary, D.S, Asti, F.S, Saharani, K. D, & Risty, V.F. K. (2025). Analisis Literatur: Peran Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* 8(3). <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024. Diakses dari [<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>].
- Bahri, S. (2023). Analisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 281-295. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5036>
- Basri, Y. M., Gusnardi, Nurmayanti, P., Julina, & Indrapraja, D. P. H. (2026). Nonfinancial government support and village-owned enterprises' performance: The mediating role of organizational sustainability. *Journal of Accounting & Organizational Change* 1-25. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2025-0081>.
- Bourguignon, F. (2003). The growth elasticity of poverty reduction: Explaining heterogeneity across countries and time periods. *Journal of Economic Growth*, 8(3), 231-255. <https://doi.org/10.1023/A:1025520821385>.
- Daud, R.M, Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* 10(2), 2022: 133-143. DOI: <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i2.39913>.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195-225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>.
- Fazri, M., Kaluge, D., & Fajar, C. M. (2022). Does village fund have an impact toward economic growth? *Economics Development Analysis Journal*, 11(4), 394-404. <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i4.60240>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Frick, S. A., & Rodríguez-Pose, A. (2023). Big or small? Cities and industrial development. *World Development*, 161, 106113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106113>
- Girardi, A., Pesci, C., & Andreaus, M. (2025). The governance of commons in the Alps: The role of Alpine Common Properties in alleviating new forms of

- poverty in mountain communities. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2024-0536>.
- Hardianto, Rasubala, J., J., J., & Helmiwan, T. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bolaang Mongondow Raya. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 5,(6), Oktober 2024. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>.
- Harianja, A., P. (2023). Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Masyarakat Terhadap PDRB Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Change Think Journal*, 2(2) 138 - 145.
- Hariato, S., & Listyani, R. H. (2025). Empowering marginalised women in rural Indonesia: A multifaceted approach. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 45(9/10), 959-980. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2025-0111>.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5(1), 802-810.
- Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (2nd ed.). The Guilford Press.
- International Monetary Fund (IMF). (2024). World Economic Outlook: April 2024. Washington, D.C.: IMF Publications.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kafabih, A., & Utami, D. W. (2024). Implikasi dana desa terhadap pembangunan dan kualitas hidup masyarakat desa. *Journal of Infrastructure, Regional and Governance Research*, 8(2). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.447>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483-499. <https://doi.org/10.1086/261763>.
- Lindiasari S, P., & Ramadhani, A., W. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non Parametrik. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)* 5 (1):9-31.
- Lubinga, S., Lubinga, M. H., Masiya, T., & Namboozee, F. (2026). Barriers to informal social protection in Uganda: Insights from beneficiaries of Village Savings and Loan Associations. *International Journal of Social Economics*, 53(5), 769-784. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2024-0639>.
- Manggala, G. D., & Yulianty, S. (2024). Analisis pengaruh dana desa dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. *AD Diwan Journal of Islamic Economics*, 4(1), 14 -27. <https://doi.org/10.51192/ad.v4i1.1076>
- Manurung, A., H., Tjahjana. D., Pangaribuan, C., H., & Tambunan, M., E. (2021). Metode Riset Akuntansi, Investasi Keuangan dan Manajemen.
- Marekan, & Ansori, T. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam: Studi di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 54-69. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.266>
- Muliza (2022). Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 6 (1).
- Nascimento, L., Lima, L., Silva-Filho, J. C. L., & Lessa, B. (2026). Building local infrastructures of care: Social enterprises and the recomposition of social value. *Social Enterprise Journal*, 1-20 <https://doi.org/10.1108/SEJ-10-2025-0239>.
- Ningsih, M., Nursini, N., & Sabir, S. (2023). Pengaruh upah minimum, inflasi dan

- investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362-372. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.696>
- Pandiangan, A., G., Priyarsono, D., S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Desember*, 10 (2): 134-153. doi: <https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.134-153>.
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 6(4), 375-391.
- Pratama, C. L & Mandai, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3(1), 241-248. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.15352>.
- Purba, G.F., Sinulingga, D., M., C., Togatorop, J., & Harahap, L.M. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 4(1). DOI: <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>.
- Qudri, M., & Sari, C., P., M. (2023). Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 06(2). <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i2.14584>
- Rahim, D., A. (2022). Pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Umum dan Investasi Terhadap Kinerja Ekonomi Papua Barat. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna* 18 (2), 73-79.
- Ramdhani, N., Anggraeni, Y., & Desmawan, D. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 136-144. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i2.79>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Rizki, I., Zulgani, & Hodijah, S. (2023). Pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi periode tahun 2001-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 18(3), 1-14. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/14031>
- Rohim, A. N., Athoillah, M. A., Solehudin, E., & Astarudin, T. (2026). Toward an adaptive social policy framework for rural empowerment: Integrating zakat and waqf in Indonesia. *International Journal of Sociology and Social Policy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-09-2025-0646>.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V.H., & Nurcahya, W.F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4)1-13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650-676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Septiani, A. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

- Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2020. *Jurnal Syntax Idea* 4 (9). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i9.1912>.
- Setiawan, I., Mai, M. U., & Setiawan. (2026). Population growth as a double-edged sword in the investment and economic growth nexus: Evidence from Indonesian provinces. *Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/JES-08-2025-0588>.
- Shalahuddin, A., Rajendra, M. A., & Massie, N. W. G. (2026). The proximity-poverty dynamic: High-value agriculture, infrastructure and rural development in Indonesia. *China Agricultural Economic Review*. <https://doi.org/10.1108/CAER-06-2025-0329>.
- Simangunsong, H., & Sihotang, D. (2023). The Impact of Economic Conditions on Social Assistance Programs and Poverty Alleviation. *Law and Economics*, 17(2). <https://doi.org/10.35335/laweco.v17i2.2>
- Simanjuntak, G.Y., Yulika, M., Putri, D.N., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3(6). DOI: . <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158>.
- Suherman, S., Zakaria, J., & Baharuddin, D. (2024). Pengaruh dana desa, PDRB, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 573-587. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1666>
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Srikandi: *Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>.
- Tavares, A. F., & Cruz, N. F. (2020). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101249. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005>
- Thantawi, T., R., Khoiri, A., Sakilah, I., & Imanudin, T. (2023). Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Sahid Business Journal*, 2(2)
- Ugochukwu, S.D., & Oruta, L.I. (2021). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria: a Disaggregated Analysis. *Path of Science*. 7(11), 4022-4035. DOI: 10.22178/pos.76-6.
- Warokka, A., Warokka, V., & Aqmar, A. Z. (2025). Financing rural futures: Governance and contextual challenges of village fund management in underdeveloped regions. *Economies*, 13(11), 1-24. <https://doi.org/10.3390/economies13110299>.
- Wasudewa, A., A., N., & Iskandar, D., A. (2023). Dampak Dana Desa terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Regional di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning. Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan* 7 (2): 138-150. DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150>.
- Widiastuti, H., Utami, E. R., Wulandari, E., & Kiranti, D. S. P. (2026). Accountability, transparency, social innovation and performance: A village-owned enterprise perspective in an emerging country. *Social Enterprise Journal*, 22 (1), 188-218. <https://doi.org/10.1108/SEJ-08-2024-0139>.